

Upaya SBY “Menjinakkan” Kelompok Mahasiswa

(Analisa Komunikasi Politik dalam Kasus SBY Mengajak
Sekelompok Mahasiswa untuk Perjalanan ke Luar Negeri

Lestari Nurhajati

Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Al Azhar Indonesia
lestari.nurhajati@gmail.com

Abstract: *The increasing price of fuel oil (BBM) in Indonesia has always been an issue that raises the pros and cons in the community. Especially the group of students will always be a driving demonstration of the anti- increasing fuel price. But interestingly when the issue of fuel price increase, President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) have a plan to work abroad and accompanied by 80s student representatives from the Student Executive Board (BEM).*

The situation when assessed with the approach of political communication will encounter an effort of domestication authorities, the President and his team to influence the opinion of the opponent group (students) who considered as a group of demonstrators. One of pressure group on political communication.

Domestication in political activities is commonly done by the authorities who felt his position threatened. This is part of the political hegemony. The excesses of this effort is the divide et impera politics. When examined from a political communications course this approach is not ideal. Political communication is considered successful if there is equality between the communicator and the communicant, without the need to “degrading” position of either party

Key Words: *communication politic, domestication, hegemoni*

Pada pertengahan bulan Maret 2012, isu naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia demikian marak dan dibarengi dengan demo-demo dari kalangan mahasiswa yang mulai hadir untuk menolak kenaikan BBM tersebut. Namun yang menarik terjadi adalah adanya rencana kunjungan presiden Susilo Bambang Yudoyono

(SBY) ke negara China, yang hendak didampingi sekitar 80-an mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berbagai kampus di Indonesia, pada akhir bulan Maret 2012 itu.

Sontak berbagai pemberitaan di beragam media pun menyoroti rencana lawatan SBY dan rombongan ke luar negeri tersebut, yang dirasakan sangat kontras dengan

kondisi demonstrasi anti kenaikan BBM yang terjadi. Sejumlah aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bahkan menolak ajakan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk kunjungan ke China bersamaan dengan kunjungan Presiden SBY ke negeri itu pada 22-24 Maret ini. Mereka menilai yang ikut rombongan Presiden SBY tersebut sebagai pengkhianat rakyat (<http://metrotvnews.com/read/news/2012/03/21/85788/Aktivis-Mahasiswa-yang-Ikut-ke-China-Penghianat/6>).

Tentu saja pro dan kontra berita tentang kunjungan SBY ke China yang didampingi mahasiswa terus menggeling di berbagai media. Bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sempat menjelaskan bahwa undangan untuk pemuda dan BEM diberikan oleh All China Youth Federation (Pemuda China). Tidak ada hubungan dengan kunjungan Presiden ke China meski waktunya bersamaan. Masih menurut Andi, agendanya pun berbeda. Dari 100 undangan, yang berangkat 87 orang. Meski Andi mengatakan undangan untuk BEM itu tidak ada kaitan dengan kunjungan Yudhoyono, beberapa pimpinan BEM justru mengaku menerima undangan dari Kemempora dengan ajakan ke China bersama Presiden Yudhoyono (<http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/03/307346/265/114/87-BEM-ke-China-Bersamaan-SBY>).

Situasi yang terjadi di atas tersebut apabila dikaji dengan pendekatan komunikasi politik maka akan ditemui adanya upaya *domestication* (penjinakan) pihak penguasa, dalam hal ini SBY dan tim untuk mempengaruhi opini kelompok lawan (dalam hal ini para mahasiswa) agar tidak lagi terlalu keras menyerang rencana kebijakan kenaikan BBM. Bahkan bila dimungkinkan *domestication* ini diharapkan mampu menjadikan mahasiswa sebagai pendukung rencana kenaikan BBM tersebut.

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana *teori domestication* ini dilihat dalam implementasinya dalam kegiatan komunikasi politik di Indonesia? Bagaimana sejarah *domestication* di Indonesia? Serta bagaimana dengan upaya SBY melakukan *domestication* pada kelompok mahasiswa baru-baru ini?

Domestication Theory

Apabila dikaji dari sisi bahasa maka kata *domestication* berasal dari *do-mes-ti-cate*, yakni: 1. *To cause to feel comfortable at home; make domestic.* 2. *To adopt or make fit for domestic use or life.* Atau lebih sederhana lagi disebut dengan: “*the trait of being easily persuaded*” yakni dilatih untuk kemudian mudah dipersuasi, diarahkan, dan diatur. Istilah-istilah di atas memang banyak digunakan dalam hubungan hewan yang dijinakkan, dipelihara di dalam lingkungan tempat tinggal manusia. Namun dalam perkembangannya istilah ini kemudian digunakan untuk berbagai konsep dan teori sosial.

Domestication Theory apabila dikaji memiliki beberapa dimensi pendekatan. Yang pertama *Domestication Theory* banyak digunakan dalam pedagogi dunia pendidikan. Wacana tentang penjinakan murid oleh para guru menjadi hal yang dikaji dalam teori ini. Bahwa *domestication* terjadi karena kepentingan para guru dan juga manajemen sekolah untuk mempertahankan *status quo* mereka atau untuk peningkatan promosi (Rodriguez, 2005).

Sementara itu dalam kegiatan politik, *domestication* secara tidak langsung dikaji oleh Benedict Anderson dalam bukunya *Imagined Communities* (1991) dan di Indonesia diterjemahkan menjadi Komunitas-Komunitas Terbayang (2002). Anderson mengungkapkan bahwa upaya penaklukan pihak yang dianggap lawan, musuh atau pada kelompok yang “berbeda” ini dilaku-

kan dengan cara proses perkawinan, pemberian *reward*, maupun penaklukan dan penguasaan fisik yang sebenarnya.

Dalam bukunya, Anderson memaparkan sejarah pembentukan koloni di Amerika yang mau tidak mau menjadikan kaum kulit putih, Indian, dan kelompok kulit berwarna (dalam hal ini orang Mexico) mengalami benturan pertemuan budaya. Kaum kulit putih selalu melihat dirinya lebih superior dan kelompok lain adalah *savage* (buas-terbelakang). Sehingga kemudian upaya penjinakannyapun dilakukan dengan sangat keras dan berbagai cara. Termasuk dengan mengijinkannya perkawinan antar ras agar ras yang dianggap “rendah” bisa dikuasai oleh ras lainnya.

Demikian juga di Eropa setelah revolusi Perancis, kebangkitan negara bangsa di berbagai negara Eropa memunculkan kesadaran masyarakat untuk tidak selalu tunduk pada pihak kerajaan. Lalu posisi penguasa, dalam hal ini kerajaan, bangsawan dan tuan tanah pun terancam akan adanya revolusi lanjutan. Namun upaya *domestication* yang dilakukan para pemimpin Eropa saat itu dengan sangat rapi. Berbagai slogan dan diskusi di ruang publik yang menyiratkan bahwa masyarakat dari berbagai kelas bisa menjadi bagian utama sebuah negara bangsa, menjadikan masyarakat kelas bawah, kaum proletar, tidak lagi berpikir bahwa kelompok borjuis adalah lawan, situasi ini terjadi di Hungaria dan Polandia. Pemberian *reward* dalam bentuk pengakuan sebagai “sebangsa dan setanah air” diberikan untuk menaklukan pihak lawan yang dianggap bisa membahayakan posisi mereka.

Teori *domestication* ini juga digunakan oleh Kerry (2009) ketika melakukan penelitian tentang upaya Uni Eropa (UE) menggunakan mata uang bersama Euro di berbagai negara Eropa. Pada kondisi tersebut semua anggota UE dijinakkan dengan penggunaan

mata uang bersama tersebut, di mana kemudian kurs Euro bergantung dari kebijakan UE yang seolah-olah membuat para anggotanya bergantung begitu saja, dan tidak berdaya.

Komunikasi Politik dan Peran Komunikator

Habermas (1989) mengatakan bahwa dengan komunikasi yang emansipatoris (melibatkan semua pihak) maka demokrasi akan tercapai. Gambaran ideal komunikasi politik seperti inilah yang sejak dulu dicita-citakan oleh Habermas. Tindakan komunikatif (Habermas, 1984), yakni saling berdiskusi, memberi keyakinan dengan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, tanpa ada pemaksaan kehendak, dan tanpa kekerasan, akan menciptakan ruang publik (*public sphere*) yang kondusif, sebagai cikal bakal dari demokrasi yang memiliki kandungan nilai otonomi dan kebebasan.

Kondisi komunikasi politik yang 100% ideal akan sulit didapatkan, namun paling tidak menuju tahapan adanya tindakan yang komunikatif, itu sudah seharusnya dijalankan oleh para pelaku politik. Terutama oleh para komunikator politik, yang menjadi tokoh sentral dalam kegiatan komunikasi politik. Posisi para komunikator haruslah sejajar sejak awal dan kemudian mereka juga harus melibatkan para komunikannya.

Para komunikator politik (*key communicators*) menurut Nimmo (1978) antara lain adalah politisi, komunikator profesional, dan aktivis. Politisi dalam hal ini adalah para pemimpin pemerintahan yang secara politik memang memegang kekuasaan, termasuk juga presiden. Sementara apabila kita membahas komunikator yang lain adalah aktivis yang di dalamnya termasuk *pressure group* (Kelompok Penekan), dan juga mahasiswa.

Mahasiswa sebagai sebuah kelas kelompok terdidik memang secara historis dari

berbagai bangsa di dunia, selalu menjadi salah satu kunci perubahan kondisi politik suatu bangsa dan negara. Sehingga menempatkan posisi kelompok mahasiswa sebagai kelompok yang “sejajar” dengan penentu kebijakan pemerintahan masih relevan dalam berbagai kasus komunikasi politik. Kesetaraan dan kesejajaran dalam berkomunikasi, yang oleh Habermas disebut juga dengan istilah komunikasi yang emansipatoris inilah yang sudah seyogyanya dimunculkan dalam kegiatan komunikasi politik di Indonesia. Tidak ada satu pihak yang dominan begitu saja.

Hegemoni, *Domestication* dan Simbol Politik

Ada tiga hal yang utama yang dikembangkan oleh Gramsci dalam konsepnya tentang Hegemoni. *Pertama*: hegemoni kepemimpinan budaya dan moral. Dalam konsep ini ia melihat masyarakat sipil yang dihegemoni oleh negara selaku pemegang kekuasaan dalam bentuk polisi dan militer, dengan keterikatan pada ekonomi, uang tunai dan kontrol moneter. Konsep hegemoni yang *kedua*, adalah negara melalui lembaga

ga pendidikan dan melakukan hegemoni pada masyarakat sipil. Sementara konsep hegemoni yang *ketiga*, adalah negara dan masyarakat sipil bisa melakukan hegemoni pada masyarakat sipil lainnya. Menurut Bocoock (2007), Gramsci kadang-kadang mendefinisikan negara sebagai “masyarakat politik” plus “masyarakat sipil”. Sehingga masyarakat sipil dengan kekuatan tertentu bisa juga melakukan tindakan hegemoni pada pihak lain (masyarakat sipil lainnya) yang dianggapnya lebih lemah.

Dari konsep hegemoni di atas dapat dilihat bahwa *domestication*, pun memiliki pola tidak jauh dari hegemoni. Yakni adanya upaya penguasaan dan penjinakan satu pihak ke pihak lainnya. Namun apabila dikaji lebih jauh penguasaan dengan pendekatan hegemoni, pihak yang terhegemoni mengalami kesadaran palsu (*false consiousness*). Sementara dalam konteks *domestication*, pihak yang dijinakkan terkadang paham bahwa ada penawaran dari pihak yang hendak menguasainya.

Namun kesamaannya adalah dalam proses hegemoni maupun *domestication*, keduanya sangat memungkinkan ditujukan untuk menguasai simbol-simbol politik yang ada. Hal ini tampak jelas dalam upaya *domestication* yang terjadi beberap kali di Indonesia, misalnya sebelum reformasi, nama-nama seperti Budiman Soejatmiko, Pius Lustrilanang, Dipo Alam dan lain sebagainya dikenal sebagai aktivis pejuang reformasi, namun ketika mereka mendapatkan posisi sebagai birokrat maupun anggota parlemen, maka hilang semua ciri mereka sebagai pejuang reformasi Indonesia.

Soeharto dan *Domestication*

Domestication di Indonesia sesungguhnya sudah terjadi beratus tahun lalu. Salah satu tindakan *domestication* melalui perkawinan politik diterapkan oleh Danang

Politik *divide et impera*, tampaknya



menjadi eksis dari proses penjinakan tersebut. Kondisi ini sempat memprihatinkan banyak pihak...

Sutowijo, pendiri Kesultanan Mataram yang memerintah sebagai raja pertama pada tahun 1587-1601, bergelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Panembahan Senopati saat hendak memperluas wilayah kekuasaannya meminta anaknya Putri Pambayun untuk menyamar menjadi seorang penari keliling, agar memikat Ki Ageng Mangir, penguasa Tanah Perdikan. Sehingga kemudian memang terjadilah penaklukan tersebut melalui pernikahan anak raja dengan orang yang dianggap sebagai “pemberontak”.

Tentu saja kisah menarik tentang perkawinan sebagai salah satu upaya penaklukan sebuah wilayah banyak dilakukan pada saat Indonesia masih dalam kekuasaan para raja. Tetapi kisah Pambayun dan Ki Ageng Mangir menjadi menonjol karena pola penaklukannya dilakukan dengan sangat halus. Bahkan berbagai kajian dan tulisan yang membahas legenda sejarah ini lebih banyak pada konteks kisah cintanya (<http://politik.kompasiana.com/2011/01/23/putri-pambayun-kepatuhan-cinta-pengorbanan-dan-ambisi-penguasa/>).

Bahkan bentuk *domestication* pun dilakukan oleh Soeharto dengan berbagai cara, misalnya saja dengan pernikahan antara anaknya Titiek dengan salah seorang “bintang muda” di kemiliteran saat itu, Prabowo Subianto (1983). Dalam perjalanan kariernya yang melesat, Prabowo yang merupakan anak dari tokoh ekonomi Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, kemudian seolah dikorbankan ketika terjadi peristiwa Semanggi, Reformasi (1998). Saat itu sebagai Panglima Kostrad yang menerjukan Tim Mawar, yang terbukti melakukan penembakan terhadap mahasiswa yang berdemo, Letjen Prabowo, dipaksa turun dari jabatannya, dan mengasingkan diri ke luar negeri.

Namun dalam setiap kesempatan bertemu dengan media selalu saja Prabowo

mengungkapkan bahwa segala tindakannya pada saat itu adalah bukti setia dan patuh kepada segala perintah atau politik Soeharto. Sebuah kepatuhan yang tak jauh beda dengan konsep *domestication* antara satu pihak dengan pihak lain. Meskipun di sisi lain, dalam sebuah kesempatan, ayah Prabowo saat diwawancara oleh media mengatakan bahwa pernikahan antara Titik dan Prabowo merupakan *historical accident*, kecelakaan sejarah (<http://m.politikana.com/baca/2009/06/17/wawancara-ayah-prabowo>). Sebuah bentuk upaya keluar dari posisi terdomestikasi, terjinakan.

Bentuk *domestication* lainnya yang dilakukan oleh Soeharto adalah saat pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1991. Padahal kebijakan Soeharto terhadap organisasi berbasis agama Islam sangatlah kontras di tahun-tahun sebelumnya. Soeharto awalnya sangat anti Komunis dan Kelompok Islam yang dianggap bisa menggoyang kursi kepresidenannya. Namun seiring perkembangan jaman, tekanan dari kelompok Islam makin terasa keras mengayun pada pemerintahan Soeharto, sehingga kemudian ICMI yang didirikan oleh Habibie, langsung didukung sepenuhnya oleh Soeharto dan dijadikan sebagai pintu masuk sarana penaklukan Soeharto pada kelompok Islam. Kemudian sejarah mencatat bahwa proses ini berlangsung mulus, berhasil mengukuhkan posisi Soeharto di mata kelompok Islam.

SBY dan *Domestication*

Domestication juga dilakukan oleh SBY dalam berbagai kesempatan dan termasuk dengan adanya pernikahan politik yang dilakukan antara anak SBY dengan anak Hatta Rajasa, Menko Perekonomian, sekaligus Ketua Partai Amanat Nasional (PAN). Meskipun mungkin secara langsung dan tidak langsung

akan ditolak oleh pihak yang bersangkutan bila isu ini diangkat ke permukaan. “Banyak pihak menilai pernikahan itu merupakan perkawinan politik antara Partai Demokrat dengan Partai Amanat Nasional. Namun SBY menampik semua itu. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menegaskan Siti Ruby Aliya Rajasa merupakan pilihan anaknya” (Republika, 22 November 2011).

Kasus penjinakan yang menjadi menarik dibahas adalah *domestication* yang baru-baru saja dilakukan oleh SBY dan timnya dalam rangka menjinakkan riuh rendahnya demonstrasi kenaikan BBM di Indonesia. Demonstrasi besar-besaran di bulan Maret 2012 ini dimotori oleh mahasiswa dari berbagai daerah. Dalam situasi seperti ini SBY kemudian melakukan perjalanan ke luar negeri dengan mengikutsertakan sejumlah mahasiswa untuk kegiatan tersebut. Dalam proses itu kemudian *domestication* menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan mahasiswa sebagai pihak yang hendak ditaklukan, karena ada dua suara yang terbelah, yakni yang setuju mengikuti perjalanan SBY ke luar negeri dan menolak ajakan tersebut.

Namun dalam pelaksanaan perjalanan ke luar negeri itu, ternyata mahasiswa yang dilibatkan bukanlah dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) melainkan lebih pada perorangan. Demikian juga organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMII), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan beberapa organisasi mahasiswa dan kepemudaan lainnya pun mendapat undangan tersebut, yang kemudian setelah dianalisa, ada beberapa yang bersikap menolak maupun menerima undangan ke China bersama SBY. Bahkan tercatat KNPI menjadi organisasi yang secara terang-terangan menerima undangan, namun berkilah menjadi bagian dari kepentingan SBY.

Politik *divide et impera*, tampaknya menjadi eksekusi dari proses penjinakan tersebut. Kondisi ini sempat memprihatinkan banyak pihak yang menyadari bahwa tindakan yang dilakukan SBY dan timnya ini sangat mengganggu persatuan dan kesatuan gerakan mahasiswa dan pemuda. Demikian juga media massa pun mengalami polarisasi, terpisah menjadi dua suara, yang satu pro pada upaya SBY “merangkul” mahasiswa, sementara yang lainnya melihat kegiatan itu sebagai kontraproduktif dari kepemimpinan SBY.

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict. 2001. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar.
- Bocock, Robert. 2007. *Pengantar Komperhensif untuk Memahami Hegemoni*. Yogyakarta: Penerbit Jala Sutra.
- Habermas, Jürgen. 1984. *The Theory of Communicative Action, Reason and Rationalization of Society*. Volume One. Boston: Beacon Press Book.
- Habermas, Jürgen. 1989. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a category of Bourgeois Society*. Cambridge: Polity.
- Nimmo, Dan. 1978. *Political Communication And Public Opinion in America*. California: Good-year Publishing Inc.
- Freeland, Felicia Hughes. 2007. *Charisma and celebrity in Indonesian politics*. Volume 7 No. 2. Singapore: SAGE Publications.
- Howell, Kerry E. 2009. *Europeanization, globalization and domestication: financial services regulation in the UK*. Volume 51, International Journal of Law and Management. UK: Emerald Group Publishing Limited
- Perwita, Anak Agung Banyu. 2005. *Islam “Symbolic Politics”¹, Democratization and Indonesian Foreign Policy*. CAEI Working Paper. Italy: Centro Argentino de Rodriguez, Alberto J..
2005. *Rejecting mediocrity and the politics of domestication*. Journal of Curriculum Theorizing. Caddo Gap Press.
- <http://metrotvnews.com/read/news/2012/03/21/85788/Aktivis-Mahasiswa-yang-Ikut-ke-China-Penghianat/6>
- <http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/03/307346/265/114/87-BEM-ke-China-Bersamaan-SBY>
- <http://politik.kompasiana.com/2011/01/23/putri-pambayun-kepatuhan-cinta-pengormaban-dan-ambisi-penguasa/>
- <http://m.politikana.com/baca/2009/06/17/wawancara-ayah-prabowo>